PEMERINTAH
PROVINSI BALI

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

TAHUN 2018-2023

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa – Ida Sang Hyang Widi Wasa atas Asung Kerta Wara NugrahaNya, Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bali dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Renstra ini disusun sebagai Dokumen dalam memberikan arahan kebijakan dalam melaksanakan kegiatan atau tugas pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

Kami menyadari Dokumen Renstra ini masih jauh dari sempurna, walaupun telah berupaya untuk menampung berbagai pemikiran, masukan serta saran- saran dari berbagai pihak, namum masih ada keterbatasan- keterbatasan dalam penyusunan Renstra ini.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja secara maksimal dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2018- 2023.

Kami tetap mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dijadikan bahan penyempurnaan.

Bali, 26 Mei 2022
Sekretaris Daerah Provinsi Bali

Dewa Made Indra
NIP. 19670203 198602 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, maka Sekretariat Daerah Provinsi Bali harus menyusun dokumen perencanaan lima tahun, yaitu Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai upaya pencapaian indikator kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran dari visi dan misi Sekretariat Daerah Provinsi Bali yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah berupa kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disertai dengan perencanaan penganggaran sebagai upaya pencapaian visi Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2018-2023 yang hendak dicapai dalam tahapan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Bali yaitu “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”.

Keterkaitan antara Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dengan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Provinsi Bali sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, pengelolaan keuangan daerah serta hukum yang akuntabel dan berbasis tekhnologi informasi.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan danEvaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
7. Peratuaran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instalansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instalasi Pemerintahan;
11. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh aparatur pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan rencana program, kegiatan dan anggaran serta indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 - 2023 adalah :

1. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan/atau Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali;
2. Sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan penganggaran Sekretariat Daerah Provinsi Bali;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

1.4. Kedudukan dan Peranan RENSTRA dalam Perencanaan Daerah

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan mempertimbangkan potensi,
peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Sebagaimana amanat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya pasal 19 ayat (3), menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan, yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang disampaikan kepada Presiden,

RENSTRA Sekretariat Daerah bersama Renstra Perangkat Daerah lainnya merupakan bagian yang utuh RPJMD Semseta Berencana Provinsi Bali. RENSTRA SETDA mengandung tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga RENSTRA ini berperan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dalam pencapaian kinerja Sekretariat Daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Bali disusun mengacu kepada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan susunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/ Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan laninnya yang mengatur tenteang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi,

Kewenagan Perangkat Daerah, serta Pedoman dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Kedudukan dan Peranan RENSTRA dalam Perencanaan Daerah

Mengemukakan secara ringkas keterkaitan peranan Renstra Perangkat Daerah dalam dokumen perencanaan Pembangunan daerah lainnya

1.5 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Sekretariat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Sekretariat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi, jumlah personil dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, Prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah.

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SekretariatDaerah berdasarkan sasaran/target Renstra Sekretariat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator pelayanan Sekretariat Daerah dan/atauindikator lainnya SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Anggaran Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah

Bagian ini menyajikan informasi anggaran, belanja dan pembiayaan basis kas untuk periode tertentu.

2.5 Tantangan Pelayanan Sekretriat Daerah

Memuat hal-hal berpotensi menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan- permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang terkait visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Sekretariat Daerah.

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada Bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Sekretariat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan.

3.4 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga

3.5 Telaahan RTRW dan KLHS

3.6 Telaah Renstra Kabupaten/Kota

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

4.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah berdasarkan hasil telaahan dan fungsi Sekretariat Daerah dalam pencapaian visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

Pada bagian ini dikemukakan rumusan Strategi dan Kebijakan jangka Menengah Sekretaris Daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode 2018 sd 2023.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

2.1. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali

Sekretariat Daerah Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretariat Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Daerah, Lembaga Lain, dan Staf Ahli Lingkungan Pemerintah Daerah.

Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi;
b. penyelenggaraan koordinasi, administrative ,supervisi, pembinaan, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi oleh Perangkat Daerah;
c. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi oleh Perangkat Daerah.
d. penyelenggaraan administrasi Sekretariat Daerah;
e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah; dan
f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi, terdiri atas:

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra, membawahi :
   A. Kepala Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
      a). Bagian Kerjasama, membawahi :

1) Unit Substansi Kerjasama Antar Daerah Dan Pihak Ketiga;
2) Unit Substansi Kerjasama Daerah Dengan Badan Usaha/Swasta; dan
3) Unit Substansi Kerja Sama Luar Negeri.

b) Substansi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi :

1) Unit Substansi Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah Dan DPRD
2) Unit Subtansi Administrasi Pemerintahan Dan Fasilitasi Penataan Wilayah; dan
3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.

c) Substansi Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

1) unit substansi sarana dan prasarana spiritual
2) unit substansi Kelembagaan Bina Spiritual; dan
3) unit substansi Kesra Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar.

B. Biro Hukum, terdiri dari :

a) Substansi Peraturan Perundang-undangan Provinsi, membawahi :

1) Unit Substansi Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;
2) Unit Substansi Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan; dan
3) Unit Substansi pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya.

b) Bagian Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/ Kota , membawahi:

1) Unit Substansi Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I;
2) Unit Substansi Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah II; dan
3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.

c) Bagian Bantuan Hukum dan HAM, membawahi :

1) Unit Substansi Fasilitasi Penyelesaian Masalah hukum;
2) Unit Substansi Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum Non Litigasi; dan
3) Unit Substansi HAM dan Penyuluhan Hukum.

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
   A. Biro Pengadaan Barang/ Jasa dan Perekonomian, terdiri dari :
      a) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) membawahi :
         1) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
         2) Unit Substansi LPSE; dan
         3) Unit Substansi Pengelola Sistem Informasi dan Pemantauan Pengadaan Barang/Jasa.
      b) Bagian Pengelola Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa membawahi :
         1) Unit Substansi Strategi dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
         2) Unit Substansi Pendampingan, Konsultasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa; dan
         3) Unit SubstansiPembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.
      c) Substansi Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
         1) Unit SubstansiEkonomi Makro, Mikro dan Sumber Daya Alam;
         2) Unit Substansi Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; dan
         3) Unit Substansi Administrasi Pembangunan Daerah.
4. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
   A. Biro Organisasi, terdiri dari :
      a) Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, membawahi :
         1) Unit Substansi Kelembagaan Provinsi;
         2) Unit Substansi Kelembagaan Kabupaten/ Kota; dan
         3) Unit Substansi Analisis dan Formasi Jabatan.
      b) Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, membawahi :
         1) Unit Substansi Reformasi Birokrasi;
         2) Unit Substansi Akuntabilitas Kinerja; dan
         3) Unit Substansi Budaya Kerja.
      c) Bagian Tata Laksana dan Perpustakaan, membawahi :
         1) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
         2) Sub Bagian Perpustakaan;

3) Unit Substansi Tata Laksana Pemerintahan; dan
4) Unit Substansi Pelayanan Publik.

B. Biro Umum dan Protokol, terdiri dari :

a) Bagian Rumah Tangga, membawahi :
   1) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
   2) Unit Substansi Urusan Rumah Tangga Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
   3) Unit Substansi Urusan Dalam.

b) Bagian Administrasi Keuangan, Aset dan Kearsipan membawahi :
   1) Sub Bagian Kearsipan
   2) Unit Substansi Keuangan dan Verifikasi Setda;
   3) Unit Substansi Akuntansi dan Penatausahaan Aset Setda; dan
   4) Unit Substansi Pengunaan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Aset Setda.

c) Bagian Protokol, membawahi :
   1) Unit Substansi Materi dan Komunikasi Pimpinan;
   2) Unit Substansi Acara; dan
   3) Unit Substansi Penyambutan

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali

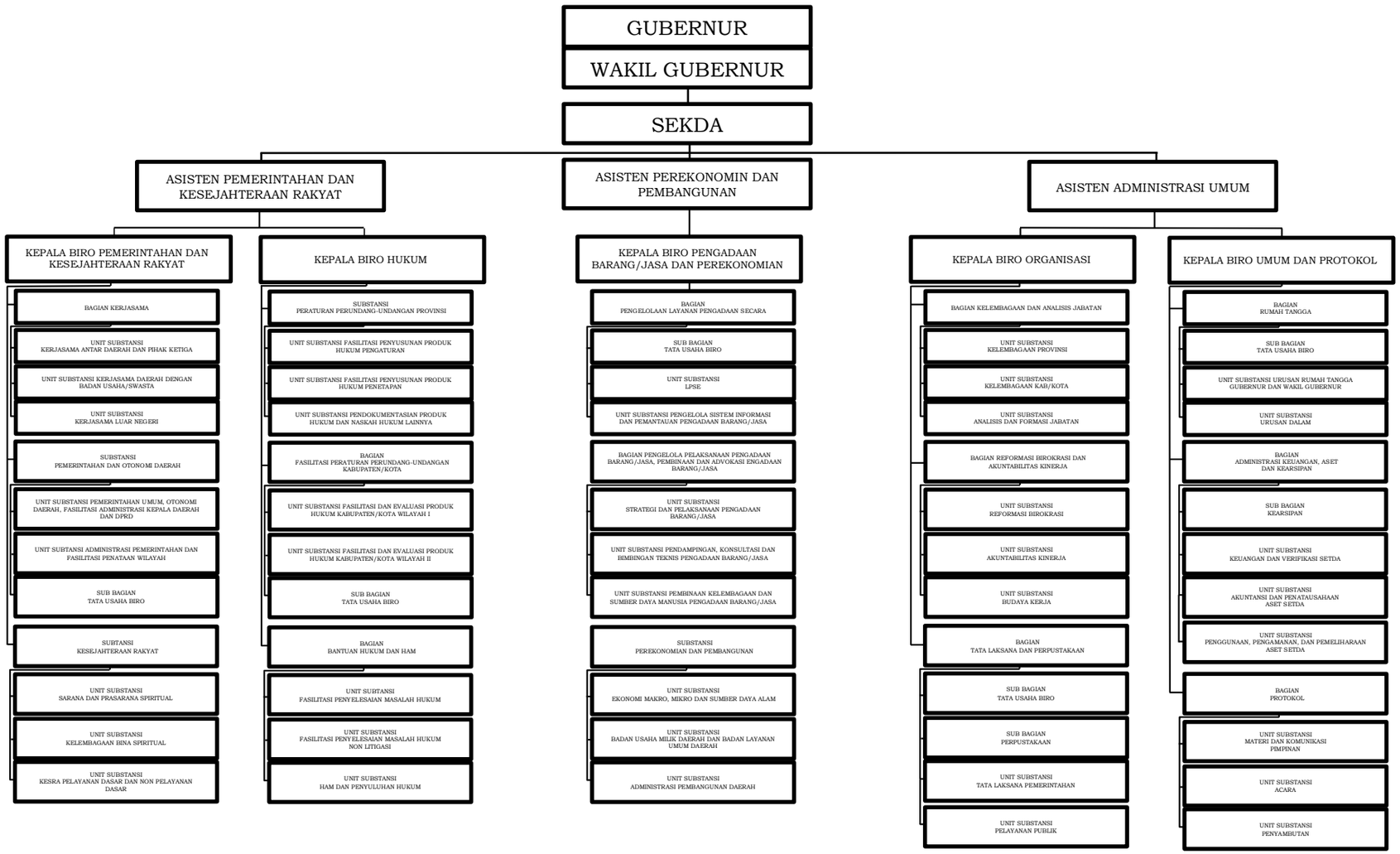

2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan peran Sekretariat Daerah, yaitu keberadaan sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, sebagai penentu keberhasilan pelaksanan tugas-tugas dan peran Sekretariat Daeraah dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Dengan SDM yang berpendidikan tinggi, Sekretariat Daerah diharapkan dapat melaksanakan tugas - tugas lembaga dan unit kerja secara lebih baik.

Untuk Menunjang pelaksanaan tugas. Sekretariat Daerah Provinsi Bali memiliki pegawai sebanyak 911 orang. Disamping potensi-potensi positif yang dimiliki SDM, juga didapkan pada beberapa potensi permasalahan, yaitu ; a) SDM tersebut belum sepenuhnya diarahkan kepada pencapaian tujuanb dan sasaran organisasi; b) pola pembinaan pegawai sejak rekrutmen, mutasi, rotasi dan promosi hingga pensiun masih belum sepenuhnya berbasiskan pada kompetensi; c) penerapan sistem manajemen sumber daya manusia masih belum optimal, dan perlu terus ditingkatkan untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi dan pegawai.

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Sekretraiat Daerah Provinsi Bali

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
	PNS	
1	Sekretaris Daerah	1
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	1
3	Asisten Perekonomian dan Ad. Pemerintahan	1
4	Asisten Adminstrasi Umum	1
5	Staf Ahli	3
6	Kepala Biro	5
7	Kepala Bagian	13
8	Koordinator	1
9	Kepala Sub Bagian	23
10	Sub Koordinator	15

11	Analis Kebijakan Ahli Madya	1
12	Analis Kebijakan Ahli Muda	3
13	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	5
14	Jafung Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	3
15	Jafung Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	7
16	Jafung Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	24
17	Jafung Pranata Komputer Pertama	3
18	Staf	219
	NON PNS	
19	Tenaga Bantuan (Kontrak)	582
	JUMLAH	**911**

Tabel 2.2

Kompisisi PNS Skretariat Berdasarkan Golongan

NO	Golongan	JUMLAH (ORANG)
1	IV	73
2	III	211
3	II	43
4	I	1
	TOTAL	328

Tebel 2.3
Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Eselon

NO	ESELON	JUMLAH (ORANG)
1	I	1
2	II	12
3	III	11
4	IV	15
5	Staf	290
	TOTAL	329

Tabel 2.4
Komposisi PNS Sekretatriat Daerah Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)	PERSEN
1	S3	1	0,30%
2	S2	86	26,22%
3	S1	167	50,91%
4	D3	11	3,35%
5	SMA/SMK	60	18,29%
6	SMP	2	0,61%
7	SD	1	0,30%
	TOTAL	328	100%

Tabel 2.5
Komposisi Tenaga Bantuan Sekretariat Daerah Provinsi Bali

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)	PERSEN
1	S3	0	0
2	S2	23	3,95%
3	S1	219	37,63%
4	D4	3	0,52%
5	D3	16	2,75%
6	D2	1	0,17%
7	D1	9	1,55%
8	SMA/SMK	264	45,36%
9	PAKET	5	0,86%
10	SMP	24	4,12%
11	SD	18	3,09%
	TOTAL	582	100%

Tabel. 2.6
Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor Sekretariat Daerah
Provinsi Bali

NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	SATUAN	KONDISI	JUMLAH
1	1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	Unit	Baik	48
2	1.3.2.05.003.001.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	Baik	134
3	1.3.2.05.002.006.008	Sound System	Unit	Baik	60
4	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	Unit	Baik	15
5	1.3.2.05.002.006.004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Unit	Baik	3
6	1.3.2.05.002.006.007	Loudspeaker	Unit	Baik	7
7	1.3.2.02.001.003.002	Pick Up	Unit	Baik	1
8	1.3.2.02.001.001.003	Station Wagon	Unit	Baik	71
9	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	Baik	11
10	1.3.2.02.001.001.002	Jeep	Unit	Baik	1
11	1.3.2.05.002.001.008	Meja Rapat	Unit	Baik	62
12	1.3.2.05.002.001.013	Meja Podium	Buah	Baik	6
13	1.3.2.02.001.002.001	Bus (Penumpang 30 Orang	Unit	Baik	3
14	1.3.2.02.001.002.002	Micro Bus (Penumpang 15	Buah	Baik	4
15	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Buah	Baik	108
16	1.3.2.06.002.001.006	Handy Talky (HT)	Buah	Baik	12

NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	SATUAN	KONDISI	JUMLAH
17	1.3.2.05.002.006.013	Megaphone	Buah	Baik	1
18	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	Buah	Baik	141
19	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	Buah	Baik	9
20	1.3.2.05.002.006.020	Stabilisator	Unit	Baik	1
21	1.3.2.05.002.007.001	Alat Pemadam/Portable	Unit	Baik	9
22	1.3.2.05.001.004.007	Brandkas	Buah	Baik	4
23	1.3.2.05.002.001.033	Kursi Biasa	Buah	Baik	4
24	1.3.2.06.002.001.003	Pesawat Telephone	Buah	Baik	21
25	1.3.2.05.002.004.001	Lemari Es	Unit	Baik	14
26	1.3.2.05.002.006.027	Alat Hiasan	Buah	Baik	3
27	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Buah	Baik	97
28	1.3.2.05.003.001.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Unit	Baik	4
29	1.3.2.05.002.001.012	Meja Telepon	Unit	Baik	14
30	1.3.2.05.003.002.011	Meja Tamu Biasa	Unit	Baik	9
31	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	Unit	Baik	216
32	1.3.2.02.001.003.001	Truck + Attachmen	Unit	Baik	1
33	1.3.2.05.001.004.004	Rak Kayu	Unit	Baik	99

NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	SATUAN	KONDISI	JUMLAH
34	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	Unit	Baik	51
35	1.3.2.05.002.003.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Unit	Baik	2
36	1.3.2.05.002.004.007	Exhause Fan	Unit	Baik	2
37	1.3.2.05.002.006.044	Lambang Instansi	Unit	Baik	5
38	1.3.2.02.001.002.002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Unit	Baik	4
39	1.3.2.02.001.001.001	Sedan	Unit	Baik	6
40	1.3.2.05.001.002.003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Unit	Baik	12
41	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	Unit	Baik	84
42	1.3.2.05.001.005.023	Overhead Projector	Unit	Baik	15
43	1.3.2.05.002.001.036	Kursi Lipat	Buah	Baik	1
44	1.3.2.08.003.012.002	Bendera Merah Putih	Buah	Baik	4
45	1.3.2.02.001.003.007	kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	Unit	Baik	1
46	1.3.2.05.002.006.048	Handy Cam	Stel	Baik	3
47	1.3.2.06.001.002.105	Layar Film/Projector	Buah	Baik	17
48	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	Buah	Baik	38
49	1.3.2.05.001.004.027	Lemari Kaca	Buah	Baik	8

NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	SATUAN	KONDISI	JUMLAH
50	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	Buah	Baik	37
51	1.3.2.05.001.002.001	Mesin Hitung Manual	Unit	Baik	2
52	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	Buah	Baik	87
53	1.3.2.05.001.005.024	Hand Metal Detector	Buah	Baik	3
54	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	Buah	Baik	106
55	1.3.2.06.002.001.001	Telephone (PABX)	Buah	Baik	14
56	1.3.2.06.002.001.010	Facsimile	Buah	Baik	3
57	1.3.2.06.002.001.022	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	Buah	Baik	3
58	1.3.2.08.002.005.001	Generator Set (Lab Scale)	Buah	Baik	1
59	1.3.2.10.002.003.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	Baik	12
60	1.3.2.05.001.003.011	Mesin Fotocopy Lainnya	Buah	Baik	3
61	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	Buah	Baik	5
62	1.3.2.05.001.005.010	Alat Penghancur Kertas	Buah	Baik	5
63	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	Baik	4
64	1.3.2.05.002.004.006	Kipas Angin	Stel	Baik	4
65	1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	Stel	Baik	13
66	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	Baik	214

NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	SATUAN	KONDISI	JUMLAH
67	1.3.2.03.001.006.001	Mesin Gergaji	Unit	Baik	2
68	1.3.2.05.002.001.048	Sofa	Buah	Baik	6
69	1.3.2.05.002.002.003	Jam Elektronik	Buah	Baik	24
70	1.3.2.05.002.005.002	Kompor Gas (Alat Dapur)	Buah	Baik	1
71	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	Buah	Baik	12
72	1.3.2.05.003.003.001	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	Buah	Baik	24
73	1.3.2.08.003.004.066	alat peraga praktek sekolah	Unit	Baik	5
74	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal	Buah	Baik	214
75	1.3.2.03.001.003.001	Battery Charge	Buah	Baik	1
76	1.3.2.05.001.005.005	White Board	Buah	Baik	7
77	1.3.2.05.001.005.076	Papan Nama Instansi	Unit	Baik	2
78	1.3.2.05.002.001.014	Meja Resepsionis	Unit	Baik	7
79	1.3.2.05.003.001.002	Meja Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	Unit	Baik	5
80	1.3.2.06.002.001.022	alat komunikasi telephone	Unit	Baik	3
81	1.3.2.06.002.006.007	alat komunikasi sosial lainnya (dst)	Unit	Baik	1
82	1.3.2.05.003.004.004	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	Unit	Baik	17

NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	SATUAN	KONDISI	JUMLAH
83	1.3.2.06.001.001.048	Uninterruptible Power Supply	Unit	Baik	17
84	1.3.2.06.002.002.004	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	Unit	Baik	5
85	1.3.2.05.002.006.017	Mic Conference	Unit	Baik	5
86	1.3.2.05.003.003.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Unit	Baik	11
87	1.3.2.06.002.006.007	alat komunikasi sosial lainnya (dst)	Unit	Baik	1
88	1.3.2.01.003.004.005	electric generating set lainnya (dst	Unit	Baik	1
89	1.3.2.05.002.006.012	Wireless	Buah	Baik	8
90	1.3.2.05.002.001.048	Sofa	Stel	Baik	6
91	1.3.2.05.002.002.003	Jam Elektronik	Buah	Baik	24
92	1.3.2.05.002.004.007	Exhause Fan	Buah	Baik	2
93	1.3.2.05.002.005.002	Kompor Gas (Alat Dapur)	Buah	Baik	2
94	1.3.2.05.003.003.001	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Wa likota	Stel	Baik	24
95	1.3.2.07.001.012.019	Exercise Treadmil	Unit	Baik	1
96	1.3.2.07.002.004.001	Sepeda Statis	Buah	Baik	1
97	1.3.2.18.001.002.001	Rambu Jalan	Unit	Baik	1
98	1.3.2.05.001.005.012	Mesin Absensi	Unit	Baik	4

NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	SATUAN	KONDISI	JUMLAH
99	1.3.2.05.001.005.003	Papan Visual/Papan Nama	Buah	Baik	2
100	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	Stel	Baik	65
101	1.3.2.05.002.001.026	Sketsel	Stel	Baik	1
102	1.3.2.05.002.001.027	Meja Makan Besi	Stel	Baik	3
103	1.3.2.05.002.006.059	Gordyin/Kray	Unit	Baik	3
104	1.3.2.05.002.006.069	Lampu	Buah	Baik	4
105	1.3.2.05.002.007.017	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	Buah	Baik	1
106	1.3.2.05.003.001.009	Meja Kerja Pejabat lain-lain	Stel	Baik	50
107	1.3.2.05.003.004.007	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	Stel	Baik	5
108	1.3.2.05.003.004.008	Kursi Rapat Pejabat lainnya	Stel	Baik	2
109	1.3.2.05.003.005.008	Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	Unit	Baik	1
110	1.3.2.08.007.002.046	Air Purlier	Unit	Baik	1
111	1.3.2.17.001.019.004	Jet Pump	Unit	Baik	3
112	1.3.2.05.002.001.011	Meja Ketik	Unit	Baik	1
113	1.3.2.06.001.001.059	Power Amplifier	Unit	Baik	1
114	1.3.2.05.002.006.015	Microphone Floor Stand	Stel	Baik	1
115	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	Stel	Baik	12

NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	SATUAN	KONDISI	JUMLAH
116	1.3.2.05.002.001.045	Nakas	Buah	Baik	1
117	1.3.2.05.002.006.029	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Unit	Baik	1
118	1.3.2.10.01.02.02	Laptop	Unit	Baik	18
119	1.3.2.05.02.01.30	Kursi Rapat	Unit	Baik	121
120	1.3.2.10.02.01.06	CPU	Unit	Baik	2
121	1.3.2.10.02.03.02	Monitor	Unit	Baik	10
122	1.3.2.05.01.04.11	Rotary Filing	Unit	Baik	1
123	1.3.2.05.02.01.03	Kursi Besi/Metal	Unit	Baik	71
124	1.3.2.05.03.03.04	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Unit	Baik	2
125	1.3.2.05.03.03.06	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	Baik	26
126	1.3.2.05.03.03.08	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	Baik	129
127	1.3.2.05.03.06.04	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	Unit	Baik	2
128	1.3.2.05.03.07.07	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	Unit	Baik	8
129	1.3.2.09.02.01.11	Target Drone	Unit	Baik	3
130	1.3.5.01.01.04.05	Buku Umum/Hukum	Unit	Baik	117
131	1.3.5.01.01.05.01	Software	Unit	Baik	2
132	02.05.01.05.77	Papan Pengumuman	Unit	Baik	3

NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	SATUAN	KONDISI	JUMLAH
133	02.05.01.05.88	Alat Kantor Lainnya/Perkakas Kantor	Unit	Baik	8
134	02.05.02.01.04	Kursi Kayu	Unit	Baik	5
135	02.05.02.06.23	Tustel	Unit	Baik	6

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Hasil evaluasi kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Bali periode jangka menengah RENSTRA Tahun 2013-2018 dapat diketahui bahwa capaian kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan sasaran/target RENSTRA tahun 2018-2020 menurut Indikator Kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel 2.7.

Tabel 2.7

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023																			
No	**Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**	**Target NSPK**	**Target IKK**	**Target Indikator Lainnya**	**Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-**					**Realisasi Capaian Tahun ke-**					**Rasio Capaian pada Tahun ke-**				
					(2018)	**(2019)**	**(2020)**	**(2021)**	**(2022)**	**(2018)**	**(2019)**	**(2020)**	**(2021)**	**(2022)**	**(2018)**	**(2019)**	**(2020)**	**(2021)**	**(2022)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Misi 11 : Mengembangkan Tata Kehidupan Krama Bali Secara Sekala Dan Niskala Berdasarkan Nilai-Nilai																			
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Sat Kerthi	-	-	-	N/A	N/A	74	76	78	N/A	N/A	77	79	-	-	-	104	101	-
Misi 22 : mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.																			
1	Nilai Evaluasi Kearsipan	-	-	-	67	70	71	61	62	67	70	71	61	-	100	100	100	100	-
2	Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip	-	-	-	25%	25%	35%	50%	75%	25%	25%	35%	50%	-	100	100	100	100	-
3	Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik	-	-	-	47%	48%	49%	51%	52%	47%	48%	49%	51%	-	100	100	100	100	-

4	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang diselesaikan dalam rangka kepastian hukum	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
5	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	-	-	-	N/A	N/A	N/A	81	82	80	N/A	N/A	88	-	N/A	N/A	N/A	100	-
6	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	-	-	75%	77%	79%	81%	-	75%	77%	79%	81%	-	100	100	100	100	-
7	Nilai/Skor LPPD Provinsi Bali	-	-	-	15	11	2	2,2	2,4	15	10	3,0	2,4	-	100	110	115	87	-
8	Meningkatnya kapasitas kelembagaan, kompetensi SDM dan kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah yang menghasilkan value for money	-	-	-	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	-	100	100	100	100	-
9	Persentase Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	80	95	90	100	100	94,34	95,70	100	100	-	117,93	110,74	111,11	100	-

	melalui Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE)																	
10	Persentase rata-rata kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

Berdasarkan Capaian Kinerja Jangka Menengah Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, ditemukan tantangan dalam pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efisiensi dan efetikvitas kelembagaan secara proposional dalam perumusan kebijakan umum meliputi pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial, perekonomian dan pembangunan serta administrasi;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas perumusan dan penyelenggaran kebijakan strategis program, kegiatan atau pekerjaan unggulan Daerah Provinsi;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis proses dan mekanisme kerja/ prosedur dalam sistem manajemen pemerintahan;
4. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kerjasama daerah dan luar negeri;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengendalian capaian kinerja kegiatan, sarana dan prasarana infrastruktur yang mumpuni untuk menopang pertumbuhan perekonomian, serta kebijakan pembiayaan pembangunan strategis;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan akuntabel dan berkeadilan;
7. Mengembangkan ekonomi kreatif dan membina BUMD;
8. Mewujudkan kehidupan harmonis intern dan antar umat beragama;
9. Menata Produk hukum daerah;
10. Meningkatkan budaya taat hukum;
11. Mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baik kebutuhan masyarakat maupun Pemerintah Daerah.

2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Sekretariat Daerah

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dinas untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang, sehingga proses penyusunan anggaran menjadi hal penting dalam sebuah proses perencanan. Sistem penganggaran yang selama ini diterapkan harus sesuai dengan sistem penganggaran yang mampu merespon perubahan-perubahan yang terjadi.

Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang ditetapkan sebagai Kaidah-kaidah Hukum Administrasi Keuangan Negara dan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan perlu merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan program/kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Penggunaan anggaran dalam pembangunan diharapkan memberikan manfaat tidak saja untuk meningkatkan pendapatan, namun juga diharapkan dapat memberikan ruang gerak ekonomi yang lebih kondusif dan menyentuh akar masalah yang faktual dalam masyarakat.

Tabel 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Bali

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sekretariat Daerah Provinsi Bali	72.525.707.362	91.395.686.549	83.437.221.685	143.445.484.863	147.795.786.340	62.280.848.745	56.080.400.929	75.850.045.684	132.229.010.437	-	86	61	91	92	-	138.783.232.434	114.755.913.037

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

Dalam pelaksanaan Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai unsur pembantu pimpinan Pemerintah Provinsi Bali yang dipimpin oleh Sekretariat Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sekretariat Daerah Provinsi Bali bertugas membantu Gubernur Bali dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bali.

Sekretariat Daerah untuk Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan atas usulan Gubernur. Sekratriat Daerah Provinsi Daerah Bali dibantu oleh 3 (tiga) Asisten yang masing-masing Asisten terdiri dari 3 Biro sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan prioritas program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Permasalahan pembangunan Provinsi Bali.
2. Dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Bali.
3. Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Bali.
4. Isu strategis dari kebijakan pembangunan Provinsi Bali yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Provinsi Bali.
5. Pemulihan Ekonomi Provinsi Bali.

Selain permasalah diatas tersebut biro-biro pada Sekretaraiat Daerah juga memiliki isu-isu /permasalahan/ kendala yang harus mendapat penanganan, isu-isu tersebut antara lain:

I. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan, meliputi sebagai berikut:
   1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Bali, meliputi:
      a. Belum optimalnya perolehan nilai/skor penyusunan LPPD;
      b. Masih adanya potensi sengketa batas wilayah;
      c. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama daerah dalam mengembangkan potensi daerah.
   2. Belum optimalnya pelaksanaan Srada dan Bhakti di kalangan Krama Bali.

II. Biro Umum dan Protokol, meliputi sebagai berikut:
   1. Tingginya dinamika pekerjaan yang butuh atensi cepat dan tepat;
   2. Belum memadai kuantitas dan kualitas SDM di bidang IT pengampu dan pengelola sistem e-office, keuangan dan BMD/Aset;
   3. Belum memadai tenaga keprotokolan yang mampu berbahasa Bali dan asing;
   4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemahaman terhadap arsip, dan
   5. Masih kurangnya sarana dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi di bidang kearsipan.

III. Biro Hukum, meliputi sebagai berikut:
   1. Kualitas perancangan dan pelayanan produk hukum daerah belum optimal;
   2. Pelayanan aksesbilitasi informasi hukum dan produk hukum daerah belum optimal;
   3. Pelayanan dan penanganan kasus-kasus hukum dan pelaporan Ham belum optimal; dan
   4. Perda dan perkada yang terdampak undang-undang cipta kerja.

IV. Biro Organisasi, meliputi sebagai berikut:
    1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum optimal;
    2. Tata kelola pemerintahan belum optimal;
    3. Pelayanan publik belum optimal; dan
    4. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan serta rendahnya minat dan budaya baca masyarakat.
V. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Ekonomi, meliputi sebagai berikut:
    1. Belum optimalnya kinerja PBJ dalam menunjang terwujudnya tujuan strategis Pemerintahan Provinsi Bali (waktu, kualitas, biaya dan layanan);
    2. Belum optimalnya pemanfaatan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk menunjang kebutuhan pelayanan pengelolaan pengadaan;
    3. Pengadaan barang/jasa pemerintahan berpotensi menjadi salah satu area rawan korupsi (nilai belanja PBJ antara 30%-40% dari total APBD);
    4. Belum optimalnya pengelolaan BUMD dan BLUD dalam menghasilkan deviden terhadap pendapatan asli daerah;
    5. Belum optimalnya kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti oleh daerah; dan
    6. Belum optimalnya pelaksanaan administrasi pelaporan pembangunan daerah.

Permasalahan terkait tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
Gambaran Pelayanan Setda :					
1. Kebijakan	Belum ada ukuran kualitas kebijakan yang dikeluarkan	Belum ada	SDM	Sumber permasalahan kebijakan	Belum dapat mengukur keberhasilan dari dampak kebijakan yang ditetapkan
2. Produk Hukum yang mencakup kuantitas, kualitas, kejelasan objek hukum	Belum dapat terpenuhinya produk hukum yang memenuhi kebutuhan baik secara kuantitas, kualitas dan dapat tersusun tepat waktu	Pedoman pembentukan peraturan, Peraturan di tingkat pusat dan Program Pembentukan Peraturan Daerah	SDM	Koordinasi dengan Perangkat Daerah pengusul Raperda dan DPRD	Keterbatasan SDM dalam melayani kebutuhan pendampingan penyusunan peraturan
3.Kelembagaan	- Evaluasi dan Penataan Perangkat Daerah tepat fungsi dan ukuran sesuai dengan ukuran - Kematangan Lembaga UKPBJ Level 3 (Proaktif	-Permendagri 99/2018 Permenpan RB 20/2018 -Perlem LKPP No 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	- Anggaran - Peralatan - SDM - Sistem pengolahan data dukung belum terintegrasi secara menyeluruh	- Perundang-Undangan - Kebijakan - Surat Edaran - Koordinasi dengan para stakeholder belum maksimal	- Data dari Perangkat Daerah yang tidak lengkap - Kurang respon dari Perangkat Daerah - Kompentasi SDM masih belum memadai
4. Penyusunan Penawaran Kerjasama Daerah	Belum mencapai target yang ditetapkan	Belum ada	Kurangnya SDM yang Kompeten dalam penyusunan proposal penawaran	Perangkat Daerah Teknis belum secara aktif mendukung materi/konten yang akan dimasukan dalam penawaran kerjasama	Pelaksanaan kerjasama masih terbatas dalam tataran administrasi, fasilitasi dan dokumentasi

5. Kualitas Layanan Keprotokolan	Masih diperlukan peningkatan pemahaman terhadap pelayanan adminstrasi, pelayanan kedinasan pimpinan dan aturan-aturan keprotokolan	Pelayanan kedinasan dan keprotokolan yang diberikan selama ini masih berdasar kebiasaan yang telah dijalani selama ini dan berdasarkan masukan	Adanya personil baru, intensitas kerja yang sangat tinggi	Belum adanya peraturan turunan/teknis tentang keprotokolan, belum pahamnya audiens mengenai aturan keprotokolan	Kurang optimalnya pelayanan administrasi dan kedinasan pimpinan serta bagian secara umum dan kurang optimalnya pelayanan kedinasan pimpinan dan keprotokolan
6. Pengendalian kegiatan	- Realisasi fisik kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan - sudah disusun Risk Register, Dokumen Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa dan Laporan SPPIP	- Realisasi kegiatan Provinsi - SOP Pengelolaan Risiko	- Kuantitas SDM - Kompetensi SDM kurang memadai	- PPTK masih kurang paham dalam menyusun perencanaan kegiatan - Pendidikan dan pelatihan belum memadai	- Keterbatasan SDM dalam melaksanakan pengendalian kegiatan - Pelaksanaan pengadaan barang/jasa kurang maksimal dalam mengelola risiko
7. Kewajiban Penyusunan dan Laporan Penyelengga-raan Pemerintahan Daerah (LPPD)	- Laporan tersusun tepat waktu - Sudah tersusun dengan baik	- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Dokumen kinerja	- Ketersediaan SDM yang memahami penyusunan laporan - Kompetensi SDM kurang memadai	- Komitmen dari Perangkat Daerah terkait untuk mensuplay data yang diperlukan dalam penyusunan laporan - Pendidikan dan pelatihan belum memadai	- Validasi dan Kelengkapan data yang dibutuhkan dari Perangkat Daerah - Pelaksanaan pelaporan kurang maksimal dalam mengelola laporan

8. Kewajiban Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali	Sudah disusun dengan baik	Hasil Evaluasi SAKIP	-	SDM kurang	Adanya mutasi ASN
9. Batas Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali	Patok dan Papan Batas masih kurang terpelihara dengan baik	Peremendagri No. 4 Tahun 2012	Kegiatan Sosialiasasi Pathok dan papan batas wilayah	Pathok batas wilayah dipasang oleh Pemerintah Provinsi Bali	Koordinasi yang belum optimal
10. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali	Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali belum dapat dilaksanankan sesuai peraturan perundangan	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat belum optimal	Komitmen Pemerintah Pusat dalam melaksanakan UU No. 23 Tahun 2014	Belum terbitnya Peraturan Pemerintah terkait dengan petunjuk pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan belum adanya kesamaan persepsi terkait pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014
11. Regulasi tentang kehidupan beragama	Fasilitasi kehidupan bergama	Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006	Ketidakjelasan tugas dan fungsi	Tingginya permohonan fasilitasi kegiatan keagamaan dan aliran kepercayaan	Tindak Tingginya permohonan fasilitasi kegiatan keagamaan dan aliran kepercayaan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023, visi Gubernur Bali :

"Nangun Sat Kerthi Loka Bali, melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana".

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dirumuskan misi

pembangunan, misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Bali adalah misi ke 11 dan 22, yaitu :

1. Misi 11 : Mengembangkan Tata Kehidupan Bali secara sekala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Atma Kerthi yaitu Atma Kerthi, Danu Kerthi, Segara Kerthi, Jana Kerthi dan Jagat Kerthi; dan
2. Misi 22 : Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif, Terbuka, Transparan, Akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

Terkait Faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat maupun pendorong pencapaian visi Gubernur Bali dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Nangun Sat Kerthi Loka Bali, melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana				
No	**Misi dan Program**	**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**	**Faktor**	
			Penghambat	**Pendorong**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
I	Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, Terbuka, Transparan, Akuntabel dan Bersih serta meningkatkan Pelayanan Publik terpadu yang Cepat, Pasti dan Murah			

1.	Program : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah - Konsep tunjangan kinerja	Tunjungan Tambahan Penghasilan belum berdasarkan kelas dan Nilai Jabatan	Kelas dianalisis berdasarkan data beziting pegawai	Nilai dan Kelas Jabatan telah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

	Peningkatan Perangkat Daerah Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	Perangkat Daerah yang telah dipetakan berdasarkan data perlu dilakukan pemetaan ulang dan dikaitan dengan visi misi Gubernur	Pemetaan urusan kurang valid	Urusan Pemerintahan sudah dibagi secara kokuren
2.	Program : Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kualitas Pelayanan Publik	Terhambatnya alih pengetahuan kepada Perangkat Daerah/Unit kerja penyelenggaraan pelayanan publik	Standar dan prosedur kerja yang tidak memadai	Kapabilitas SDM yang mumpuni
			Sistem, prosedur dan hubungan kerja belum memadai	Komitmen yang tinggi dari Biro Organisasi Setda Provinsi Bali

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari dokumen lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

1. Optimalisasi kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan Daerah;
2. Efektifitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelembagaan;
3. Penataan Ketataklasanaan;
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
6. Optimalisasi Pengendalian Pembangunan;
7. Optimaliasi Pelayanan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
8. Penataan produk hukum dan meningkatkan budaya taat hukum;
9. Optimalisasi Penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah;
10. Belum optimalnya penataan Capaian Kinerja Penyenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018;
11. Belum optimalnya optimalisasi evaluasi produk hukum daerah;
12. Belum optimalnya penataan Kelembagaan Perangkat Daerah;
13. Belum optimalnya penataa ketatalaksanaan Perangkat Daerah;
14. Belum Optimalnya penataan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat;
15. Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih;
16. Belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada Unit Pelayanan Publik (UPP) atas penilaian Ombudsmen;
17. Kurang memandaikan sarana kerja terutama tata ruang kerja yang belum sepenuhnya dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur;

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas guna mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan sasaran misi RPJMD, Sekretariat Daerah Provinsi Bali diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu mengatasi dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan fasilitasi dan

koordinasi dalam menghasilkan rumusan kebijakan umum yang berkualitas dan akuntabel. Sehingga diperlukan keterlibatan pelaku pembangunan secara partisipatif melalui peningkatan kualitas peningkatan kapasitas SDM seluruh Biro lingkup Sekretariat Daerah, pemantapan kelembagaan Biro di tunjang oleh sarana dan prasarana kerja yang berkontribusi secara optimal dalam membangun etos kerja yang prima, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

3.4. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga

Sasaran Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2015-2019

Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
				2015	2019
1	2	3		4	5
1	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa		Jumlah Peristiwa konflik sosial	83 peristiwa	83 peristiwa
2	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas	1	Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu	73,2%	77,5%
		2	Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada	<10%	<10%
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	1	Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	55%	80%
		2	Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonom baru	20%	70%
		3	Jumlah Perda bermasalah	350 perda	50 perda
		4	Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal	45%	70%

4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	5	Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah	30%	70%
		1	Persentase penerapan SPM di Daerah (prov/kab/kota)	75%	90%
		2	Persentase daerah yang memenuhi pelayanan Dasa	-	60%
		3	Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima	34 provinsi	34 provinsi dan 204 kab/kota
		4	Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM	20%	60%

		5	Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM	10%	50%
		6	Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik	100% provinsi 5% Kab/Kota	100% provinsi 30% Kab/Kota
5	Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah		Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	50% berkinerja baik	70% berkinerja baik
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.	1	Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat	15%	25%
		2	Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu	30 provinsi 250 Kab/Kota	30 provinsi 300 Kab/Kota
		3	Jumlah prov/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu	30 provinsi 250 Kab/Kota	30 provinsi 300 Kab/Kota
		4	Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual	30 provinsi 250 Kab/Kota	30 provinsi 300 Kab/Kota
7	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat	1	Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	5.000 desa	40.000 desa
		2	Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel	5.000 desa	40.000 desa
		3	Jumlah desa swasembada	2.000 desa	10.000 desa
8	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	1	Peningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat	34 provinsi 514 Kab/Kota	34 provinsi 514 Kab/Kota

		2	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	75%	85%
9	Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	1	Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan e-KTP oleh lembaga pengguna Pusat	21 lembaga	40 lembaga
		2	Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak	269 daerah	541 daerah
10	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri	1	Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental	50%	85%
		2	Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni	65%	85%
		3	Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM	30%	80%
11	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri	1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri	WTP	WTP
		2	Nilai Penegakan Integritas - Bebas Korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah	B (75)	B (85)
12	Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi	1	Akuntabilitas Kinerja Kemendagri	Lapkin A	Lapkin A
		2	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri	B	A

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri tidak ada keterkaitan langsung dengan pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Bali namun ada beberapa indikator sasaran Renstra Kemendagri yang sejalan dengan ketugasan di Sekretariat Daerah Provinsi Bali, yaitu :

1. Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Jumlah Perda bermasalah;
3. Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal.

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. RTRW Provinsi Bali merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Bali. Untuk mewujudkan RTRW Provinsi Bali selain menyusun konsep dan strategi pembangunan, RTRW Provinsi Bali disusun berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam RTRW Nasional, dimana posisi Provinsi Bali yang merupakan kawasan perkotaan dengan potensi pendidikan, pariwisata, pelayanan jasa dan perdagangan, telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

Provinsi Bali mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi Provinsi Bali sebagai pusat periwisata berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Provinsi Bali yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Provinsi Bali. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Provinsi Bali menetapkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Provinsi Bali sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Provinsi Bali. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain:

a. ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional;
c. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
e. terciptanya ruang-ruang provinsi yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Provinsi Bali;
f. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang provinsi untuk

kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;

g. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomer 16 Tahun 2009 tentang penataan ruang Provinsi Bali diarahkan untuk menjadikan sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya bali yang dijiwai oleh Agama Hindu sesuai dengan falsafah *Tri Hita Karana*, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Provinsi Bali, rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang yang terdiri dari kawasan budidaya, kawasan strategis dan kawasan lindung. Kawasan budidaya mempunyai fungsi kawasan untuk dibudidayakan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak kelestarian lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan. Arahan kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, kawasan pariwisata diarahkan dengan mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang dan fasilitas pada kawasan pariwisata terutama pada wilayah daerah periwisata bali yang meliputi Kawasan Kawasan Pariwisata Candikesuma di Kabupaten Jembrana, Kawasan Pariwisata Perancak di Kabupaten Jembrana, Kawasan Pariwisata Soka di Kabupaten Tabanan, Kawasan Pariwisata Sanur di Kota Denpasar, Kawasan Pariwisata Kuta di Kabupaten Badung, Kawasan Pariwisata Tuban di Kabupaten Badung, Kawasan Pariwisata Nusa Dua di Kabupaten Badung, Kawasan Pariwisata Ubud di Kabupaten Gianyar, Kawasan Pariwisata Lebih di Kabupaten Gianyar, Kawasan Pariwisata Nusa Penida di Kabupaten Klungkung, Kawasan Pariwisata Candidasa di Kabupaten Karangasem, Kawasan Pariwisata Ujung di Kabupaten Karangasem, Kawasan Pariwisata Tulamben di Kabupaten Karangasem, Kawasan Pariwisata Kalibukbuk di Kabupaten

Buleleng, Kawasan Pariwisata Batu Ampar di Kabupaten Buleleng dan Kawasan Pariwisata Air Sanih di Kabupaten Buleleng, Kawasan peruntukan permukiman) mencakup fungsi-fungsi kawasan untuk lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan, terdiri atas; kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, fasilitas pemerintahan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas rekreasi dan olah raga, ruang terbuka hijau dan fungsi pemanfaatan ruang lainnya sesuai karakter tiap kawasan permukiman, lebih lanjut diatur dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi mengacu pada rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi bali dilaksanakan melalui :

a. Pengembangan indikasi program utama pemanfaatan ruang;
b. Penatagunaan tanah;
c. Penatagunaan air; dan
d. Penatagunaan ruang udara.

Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah

No.	Rencana Struktur Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Setda
1	Sistem perkotaan	Tidak ada keterkaitan langsung
2	Sistem jaringan transportasi	Tidak ada keterkaitan langsung
3	Sistem jaringan energi	Tidak ada keterkaitan langsung
4	Sistem jaringan telekomunikasi	Tidak ada keterkaitan langsung
5	Sistem prasarana pengelolaan lingkungan	Tidak ada keterkaitan langsung
6	Sistem jaringan penerapan jalan	Tidak ada keterkaitan langsung

Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah

No.	Rencana Pola Ruang	Pengaruh Rencana Pola Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Setda
1	Kawasan Lindung Daerah	Tidak ada keterkaitan langsung
2	Kawasan Budidaya Daerah	Tidak ada keterkaitan langsung

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP). Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Provinsi Bali tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di wilayah Provinsi Bali. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap

menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan. Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencemaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, di sisi lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat. Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di wilayah Provinsi Bali berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya tak terbarukan, sehingga nilai air di sini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungannya sehingga akan muncul alternatif penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasional lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi penyadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di wilayah Provinsi Bali. Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di wilayah Provinsi Bali apabila KRP dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap perubahan temperatur udara yang semakin tinggi. Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat

ketahanan keanekaragaman hayati di Wilayah Provinsi Bali ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di wilayah Provinsi Bali dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS

No.	Aspek Kajian	Implikasi Terhadap Pelayanan Setda
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Tidak ada keterkaitan langsung
2	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Tidak ada keterkaitan langsung
3	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Tidak ada keterkaitan langsung
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Tidak ada keterkaitan langsung
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Tidak ada keterkaitan langsung
6	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Tidak ada keterkaitan langsung

Berdasarkan hasil analisis KLHS, telaah rencana struktur ruang maupun rencana pola ruang wilayah di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Bali tidak ada keterkaitan langsung.

3.6. Telaah Renstra Kabupaten/Kota

Nilai hasil akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Daerah kabupaten dan Kota di Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagaimana dibawah ini.

NO	NAMA	NILAI	PREDIKAT
1	PEMERINTAH PROVINSI BALI	78.44	BB
2	PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG	78.07	BB
3	PEMERINTAH KOTA DENPASAR	73.33	BB
4	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG	68.85	B
5	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM	68.47	B
6	PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA	67.80	B
7	PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR	67.51	B
8	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG	66.05	B
9	PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN	65.85	B
10	PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI	64.07	B

Berdasarkan pada data tabel diatas menunjukan bahwa nilai AKIP Kabupaten dan Kota di Bali masih seluruhnya telah memcapaian dengan kategori baik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota atau provinsi dengan kabupaten dan kota, diatur berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, diselenggarakan berdasarkan kriteria tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Salah satu yang menopang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah berfungsi sangat strategis dalam melaksanakan pelayanan informasi, administrasi dan bahkan berbagai aspek fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan demikian peranan dan fungsi serta kinerja Sekretaris Daerah begitu penting dan sangat strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerah.Tujuan, dan Sasaran yang erat kaitannya dengan tugas Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Bab ini memuat tujuan dan sasaran RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Bali yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Bali ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Provinsi Bali, dan isu-isu strategis yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program biro-biro.

Tabel. 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Indeks Kepuasan Pelayanan Sat Kerthi	Indeks/ Nilai	NA	NA	NA	74	76	78	80
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sektor Publik	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik	Persen	75%	75%	77%	79%	81%	83%	85%
Meningkatnya kualitas Tata Kelola pemerintahan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai Evaluasi Kearsipan	Indeks/ Nilai	NA	67	70	71	61	62	63

Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
		Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip	Persen	NA	25%	25%	35%	50%	75%	100%
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja di Biro Umum dan Protokol setda Provinsi Bali	Indek/ Nilai	NA	80	80	80	81	82	83
		Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang diselesaikan dalam rangka kepastian hukum	Persen	NA	NA	100	100	100	100	100
		Persentase Perpustakaan yang tertangani dengan baik	persen	-	-	-	50%	51%	52%	53%

Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		TARGET				
				2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Nilai/Skor LPPD Provinsi Bali	Nilai/Skor	17	15	11	2	2.2	2.4	2.6

Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
Membantu Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan, pembinaan dan pelayanan pengadaan barang/jasa serta perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan administrasi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Terwujudnya kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah yang menghasilkan value for money	Indeks Tata Kelola Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Minimal Baik	indeks	N/A	70	75	80	85	90	95

	Terwujudnya perekonomian Bali yang beradaya saing dan berkelanjutan serta meningkatkan tertib administrasi pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	%	N/A	100	100	100	100	100	100
		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	N/A	50	54	65	76	87	100

4.2 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya tata kelola pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali minimal baik dalam menunjang visi, misi dan program Pemerintah Provinsi Bali.	Indeks tata kelola pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Minimal Baik	Persentase rata-rata Pemanfaatan Sistem PBJ (SiRUP, E-Tendering/E-Seleksi, E-Purchasing, Non-E-Tendering & Non-E-Purchasing, E-Kontrak)	Bagian Pengelolaan LPSE pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
			Persentase Keterisian Jabatan Fungsional PBJ terhadap Formasi yang sudah Mendapatkan Rekomendasi	Bagian P2PA pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali
			Tingkat kematangan lembaga UKPBJ	Bagian P2PA pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali
			Persentase rata-rata capaian kinerja pengadaan barang/jasa (ketepatan waktu, biaya, kualitas dan layanan)	Bagian P2PA pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali
2.	Terwujudnya perekonomian Bali yang beradaya saing dan berkelanjutan serta meningkatkan tertib administrasi pembangunan.	Persentase rata-rata kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian sesuai dengan ketentuan	Unit Substansi Ekbang pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang diselesaikan dalam rangka kepastian hokum	Jumlah produk hukum daerah yang selesai diharmonisasi dan koordinasi hukum yang dilaksanakan dibagi jumlah draft produk hukum daerah dan koordinasi hukum yang diajukan SKPD dan Pem. Kab./Kota x 100	Biro Hukum

4.	Terwujudnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah	Persentase Kepuasan Pelayanan	Jumlah Kepuasan ————————X 100 Jumlah Permohonan	Biro Umum dan Protokol
5.	Terwujudnya Arsip lembaga Pemerintah, Organisasi Masyarakat yang dikelola sesuai NISPK	Indeks Kearsipan	1. Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan 2. Program Kearsipan 3. Pengelolaan Arsip Inaktif dengan Retensi sekurang-kurangnya 10 tahun 4. Penyusunan Arsip 5. Pengelolaan Arsip Statis 6. Sumber Daya Manusia Kearsipan 7. Kelembagaan 8. Sarana dan Prasarana Kearsipan	
6.	Terwujudnya Birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif dan efisien, mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas serta pelayanan perpustakaan dalam menumbuhkan minat dan budaya baca masyarakat	. Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik	Jumlah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Bali / Jumlah Perangkat Daerah yang Reformasinya baik X 100	Biro Organisasi
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Jumlah responden / Jumlah responden yang menyatakan baik X 100	
	Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sat Kerthi	Indeks Kepuasan Pelayanan Sat Kerthi	Kebijakan Bina Mental dan Spiritual di Provinsi Bali difokuskan pada Upaya Optimalisasi pelayanan Atma Kerthi di Provinsi Bali yang mencakup peningkatan pengetahuan keagamaan, Sradha dan Bhakti serta Rasa kepuasan Bathin umat Hindu	Biro Pemerintahan dan Kesra

			atas dukungan sarana prasarana Upacara keagamaan Survey Persepsi Penerima Layanan Atma Kerthi (Pemangku dan Pengempon Pura) mengacu pada Ketentuan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Permenpan Nomor 14 Tahun 2017. Pelaksanaan Survey oleh Pihak Ketiga (Akademisi UNHI Denpasar) pada responden yang mencakup Pemangku dan Pegempon Pura di Bali dan Luar Bali. Adapun Instrument disusun terdiri dari Instrument dasar dengan pertimbangan pada aspek Budaya Bali dan Agama Hindu dan tambahan sesuai layanan yang diselenggarakan. Metodologi Survey menyesuaikan pada konsep dasar falsafah Agama Hindu dan Budaya Bali.	

8.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Nilai/Skor LPPD Provinsi Bali	Mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 74; LPPD merupakan dokumen penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja; Peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Peringkat LPPD Provinsi Bali diukur dari meningkatnya skor Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Indeks kesesuaian materi (IKM) dan Indeks Capaian Kinerja (ICK) yang terdiri dari : 1. Tataran Pengambil kebijakan : dilakukan terhadap kinerja Kepala Daerah dan DPRD sebanyak 13 aspek. 2. Tataran Pelaksana Kebijakan : Bidang administrasi umum dilakukan terhadap kinerja OPD yang menyelenggarakan	Biro Pemerintahan dan Kesra

			urusan pemerintahan daerah sebanyak 8 (delapan) aspek. 3. Tataran Pelaksana kebijakan : urusan pemerintahan dilakukan terhadap kinerja OPD yang melaksanakan 24 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan.	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi perangkat daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya- upaya nyata dalam mewujudkan visi perangkat daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Strategi dan Arah Kebijakan yang erat kaitannya dengan tugas Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Rumusan strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Bali

Visi : "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali, melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana"*			
Misi : Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, Terbuka, Transparan, Akuntabel dan Bersih serta meningkatkan Pelayanan Publik terpadu yang cepat, Pasti dan Bersih.			
Tujuan	**Sasaran**	**Stategi**	**Arah Kebijakan**
1. Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	1. Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Optimalisasi peran Lembaga Keagamaan dan Penerapan Nilai-nilai Falsafah Sad Kerthi	1. Monitoring dan Evaluasi Penerapan Nilai-nilai Falsafah Sad Kerthi
		Fasilitasi dan pemberian bantuan (subsidi) untuk pelaksanaan upacara Pitra Yadnya bagi seluruh Krama Bali dan bantuan sarana peribadatan Pura (Sad Kahyangan, Dang Kahyangan, Kahyangan Jagat, Kahyangan Desa	1. Evaluasi capaian kebijakan Kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	2. Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Penataan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang terintegrasi	1. Pemantauan dan Evaluasi efektifitas penyusunan LPPD Provinsi Bali Terintegrasi
3. Meningkatkan kebijakan penyelenggara pemerintah yang berkualitas	3. Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.	Penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum	1. Meningkatkan kualitas penyusunan Peraturan Perundang-undangan
			2. Mengoptimalkan fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dengan DPRD

			3. Meningkatkan kualitas layanan konsultasi hukum dan penyelesaian sengketa hukum
			4. Meningkatkan implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
			5. Meningkatkan pembinaan masyarakat sadar hukum
			6. Meningkatkan kualitas penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah
4. Membantu Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan, pembinaan dan pelayanan pengadaan barang/jasa serta perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan administrasi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	4.Terwujudnya kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah yang menghasilkan value for money	Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	1.Meningkatkan fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan kinerja pengadaan barang/jasa yang tepat waktu, kualitas, harga dan penyedia serta pengembangan katalog lokal dalam mendukung peningkatan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas.
			2.Meningkatkan fungsi pembinaan dan advokasi untuk mengurangi dan mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penguatan kelembagaan dan pemenuhan serta peningkatan profesionalisme dan komptensi SDM pengadaan.
			3.Meningkatan fungsi pengelolaan pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui pemenuhan standar LPSE, dan pengembangan manajemen informasi untuk meningkatkan kepercayaan publik dan kepuasan pelanggan internal dan eksternal.
	Terwujudnya perekonomian Bali yang beradaya saing dan berkelanjutan serta meningkatkan tertib administrasi pembangunan	Terselenggaranya fasilitasi kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan daerah sesuai ketentuan	1.Pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok, percepatan akses keuangan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam

			2.Pengendalian tata kelola dan pelayanan BUMD dan BLUD
			3.Pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah
5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sektor Publik.	Membangun Sarana Prasarana Pelayanan Publik yang Terintegrasi anatar Instansi Lembaga Pemerintahan Daerah.	1. Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan kompetensinya
6. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.	Membangun Sistem Tata Kelola yang Terintegrasi	1. Pelayanan Publik terselenggara dengan cara – cara yang efisien,efektif dan transparan.
		Terwujudnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah	1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM di bidang IT dan keuangan / Aset
			2. Meningkatnya tenaga keprotokolan
		Terwujudnya arsip lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat yang dikelola sesuai NSPK	1. Optimalnya pengelolaan dan pemahaman terhadap arsip

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan merupakan program prioritas pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Penyelarasan Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Pemilihan kegiatan dari program prioritas tersebut dilaksanakan berdasarkan strategi dan kebijakan dalam mencapai visi dan misi Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakaan secara sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencaapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Indikator kinerja program (*outcome*/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

Indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan

sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.

Data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) pada untuk setiap indikator kinerja merupakan data capaian awal tahun perencanaan dan menjadi titik tolak perumusan target kinerja pada periode perencanaan.

Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan sebagaimana dituangkan pada Tabel T-C.27 sebagai berikut :

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1)	*2)*	*3)*	*5)*	*6)*	*7)*	*8)*	*9)*	*10)*	*11)*	*12)*	*13)*	*14)*	*15)*	*16)*	*17)*	*18)*	*19)*	*20)*	*21)*
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai / Skor LPPD Provinsi Bali	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	Nilai/Skor LPPD Prov Bali	**Peringkat 15**	P.11	2.845.300.246	P.9	2.900.300.246	3.0	1.600.300.242	3,1	2.700.300.234	3,2	2.845.300.246	3,2	2.845.300.246	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	DPS/ Kab / Kota
			Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Kebijakan dan Regulasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%	700.000.000	100%		100%		100%		100%		100%		Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1)	*2)*	*3)*	*5)*	*6)*	*7)*	*8)*	*9)*	*10)*	*11)*	*12)*	*13)*	*14)*	*15)*	*16)*	*17)*	*18)*	*19)*	*20)*	*21)*
			Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD/e-LPPD)	60 Buku	60 Buku	250.000.000	20 Buku	150.000.000	2 Buku	150.000.000	20 Buku	150.000.000	20 buku	200.000.000	20 buku	200.000.000	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan PATEN	1 laporan	1 laporan	100.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Obyek Penataan Wilayah yang tertangani dengan baik	0	1 segmen/2 penlok	350.000.000		250.000.000	2 Penlok	150.000.000	3 penlok	150.000.000	2 penlok	150.000.000	2 penlok	200.000.000	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
			Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	550.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	20.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1)	*2)*	*3)*	*5)*	*6)*	*7)*	*8)*	*9)*	*10)*	*11)*	*12)*	*13)*	*14)*	*15)*	*16)*	*17)*	*18)*	*19)*	*20)*	*21)*
			Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi KHD/WKDH, Pimpinan/Anggota DPRD	1 dokumen	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
			Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Laporan Urusan Pemerintahan di Provinsi dan kabupaten/kota yang pelaksanaannya belum optimal	1 laporan	1 laporan	150.000.000	1 laporan	150.000.000	1 laporan	150.000.000	1 laporan	~~	1 laporan	~~	1 laporan	~~	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
			Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	1 laporan	1 laporan	150.000.000	1 laporan	150.000.000	1 laporan	150.000.000	1 laporan	~~	1 laporan	~~	1 laporan	~~	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1)	*2)*	*3)*	*5)*	*6)*	*7)*	*8)*	*9)*	*10)*	*11)*	*12)*	*13)*	*14)*	*15)*	*16)*	*17)*	*18)*	*19)*	*20)*	*21)*
			Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti	25%	25%	1.478.600.560	25%		25%		25%		25%		25%		Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah yang ditindaklanjuti	~~	1 dokumen	978.600.560	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	1.324.500	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta yang ditindaklanjuti	~~	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
			Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Potensi Kerjasama	~~	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1)	*2)*	*3)*	*5)*	*6)*	*7)*	*8)*	*9)*	*10)*	*11)*	*12)*	*13)*	*14)*	*15)*	*16)*	*17)*	*18)*	*19)*	*20)*	*21)*
Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Sat Kerthi	Meningkatnya kualitas kebijakan Bina Mental dan Spiritual	Indeks Kepuasan Layanan Atma Kerthi	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Indeks Kepauasan Layanan Atma Kerthi	~~	~~	4.434.500.640	74	20.550.000.000	76	15.850.000.000	77	17.850.000.000	78	20.400.000.000	78	20.400.000.000	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	DPS/ Kab/ Kota
			Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Pengembangan Pembinaan Mental Spiritual	~~	100%	1.434.500.640	100%	13.250.000.000	100%	11.100.000.000	100%	13.100.000.000	100%	15.150.000.000	100%	15.150.000.000	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Fasilitasi Upacara Keagamaan	~~	354 upacara	984.500.640	455 upacara	13.000.000.000	455 upacara	11.000.000.000	455 upacara	13.000.000.000	455 upacara	15.000.000.000	455 upacara	15.000.000.000	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	~~	1 dokumen	450.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1)	*2)*	*3)*	*5)*	*6)*	*7)*	*8)*	*9)*	*10)*	*11)*	*12)*	*13)*	*14)*	*15)*	*16)*	*17)*	*18)*	*19)*	*20)*	*21)*
			Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Pengembangan Kesra Pelayanan Dasar Yang tertangani	~~	100%	2.500.000.000	100%	3.400.000.000	100%	4.500.000.000	100%	4.500.000.000	100%	5.000.000.000	100%	5.000.000.000	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
			Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 dokumen	1 dokumen	2.500.000.000	1 dokumen	3.400.000.000	1 dokumen	4.500.000.000	1 dokumen	4.500.000.000	1 dokumen	5.000.000.000	1 dokumen	5.000.000.000	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
			Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Pengembangan Kesra Non Pelayanan Dasar Yang tertangani	~~	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1)	*2)*	*3)*	*5)*	*6)*	*7)*	*8)*	*9)*	*10)*	*11)*	*12)*	*13)*	*14)*	*15)*	*16)*	*17)*	*18)*	*19)*	*20)*	*21)*
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	500.000.000	1 Rekomendasi	500.000.000	1 Rekomendasi	250.000.000	1 Rekomendasi	250.000.000	1 Rekomendasi	250.000.000	1 Rekomendasi	250.000.000	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Perkantoran	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali**	~~	~~	~~	75		76		77		78		78		Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	DPS

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1)	*2)*	*3)*	*5)*	*6)*	*7)*	*8)*	*9)*	*10)*	*11)*	*12)*	*13)*	*14)*	*15)*	*16)*	*17)*	*18)*	*19)*	*20)*	*21)*
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	~~	100%	200.000.000	100%	205.000.000	100%	130.000.000	100%	155.000.000	100%	175.000.000	100%	195.000.000	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	~~	2 dokumen	150.000.000	2 dokumen	150.000.000	2 dokumen	80.000.000	2 dokumen	95.000.000	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	120.000.000	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersedia	~~	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	55.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	60.000.000	2 dokumen	75.000.000	2 dokumen	75.000.000	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1)	*2)*	*3)*	*5)*	*6)*	*7)*	*8)*	*9)*	*10)*	*11)*	*12)*	*13)*	*14)*	*15)*	*16)*	*17)*	*18)*	*19)*	*20)*	*21)*
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Selesai Tepat Waktu	~~	100%	8.800.450.000	100%	6.390.000.000	100%	5.510.650.000	100%	5.610.000.000	100%	5.697.000.000	100%	5.284.500.000	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu	~~	36 org	8.750.450.000	36 org	6.340.000.000	36 org	5.460.650.000	36 org	5.560.000.000	36 org	5.647.000.000	36 org	5.234.500.000	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang tersedia	~~	3 laporan	50.000.000	3 laporan	50.000.000	3 laporan	50.000.000	3 laporan	50.000.000	3 laporan	50.000.000	3 laporan	50.000.000	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat	~~	100%	340.000.000	100%	395.000.000	100%	440.000.000	100%	380.000.000	100%	377.000.000	100%	395.000.000	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1)	*2)*	*3)*	*5)*	*6)*	*7)*	*8)*	*9)*	*10)*	*11)*	*12)*	*13)*	*14)*	*15)*	*16)*	*17)*	*18)*	*19)*	*20)*	*21)*
				Daerah yang ditangani															
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan kantor yang tersedia	~~	1 paket	25.000.000	1 paket	25.000.000	1 paket	35.000.000	1 paket	35.000.000	1 paket	42.000.000	1 paket	45.000.000	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	~~	1 paket	45.000.000	1 paket	55.000.000	1 paket	60.000.000	1 paket	55.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	60.000.000	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen yang dicetak dan digandakan	~~	1 paket	35.000.000	1 paket	40.000.000	1 paket	45.000.000	1 paket	40.000.000	1 paket	35.000.000	1 paket	40.000.000	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	~~	1 tahun	235.000.000	1 tahun	275.000.000	1 tahun	300.000.000	1 tahun	250.000.000	1 tahun	250.000.000	1 tahun	250.000.000	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1)	*2)*	*3)*	*5)*	*6)*	*7)*	*8)*	*9)*	*10)*	*11)*	*12)*	*13)*	*14)*	*15)*	*16)*	*17)*	*18)*	*19)*	*20)*	*21)*
			Konsultasi SKPD																
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang Tertata	~~	100%	715.000.000	100%	730.000.000	100%	685.000.000	100%	715.000.000	100%	730.000.000	100%	700.000.000	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan DInas Jabatan	~~	5 R4, 9 R2	250.000.000	5 R4, 9 R2	250.000.000	5 R4, 9 R2	250.000.000	5 R4, 9 R2	250.000.000	5 R4, 9 R2	250.000.000	5 R4, 9 R2	250.000.000	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1)	*2)*	*3)*	*5)*	*6)*	*7)*	*8)*	*9)*	*10)*	*11)*	*12)*	*13)*	*14)*	*15)*	*16)*	*17)*	*18)*	*19)*	*20)*	*21)*
			Sub Kegiatan penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan /BBM	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	~~	6 R4, 9 R2 dan BBM	350.000.000	6 R4, 9 R2 dan BBM	350.000.000	6 R4, 9 R2 dan BBM	350.000.000	6 R4, 9 R2 dan BBM	350.000.000	6 R4, 9 R2 dan BBM	350.000.000	6 R4, 9 R2 dan BBM	350.000.000	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	~~	1 paket	15.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	5.000.000	1 paket	5.000.000	1 paket	5.000.000	1 paket	5.000.000	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	~~	1 paket	65.000.000	1 paket	70.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	65.000.000	1 paket	75.000.000	1 paket	50.000.000	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Pemeliharaan Sarana Prasarana	~~	1 paket	35.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	30.000.000	1 paket	45.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	45.000.000	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1)	*2)*	*3)*	*5)*	*6)*	*7)*	*8)*	*9)*	*10)*	*11)*	*12)*	*13)*	*14)*	*15)*	*16)*	*17)*	*18)*	*19)*	*20)*	*21)*
			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pendukung															

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Biro Hukum
Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatnya kualitas Tata Kelola pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik	4.01.05	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hokum	100%	100	5.971.789.284	100	3.830.335.881	100	4.423.058.674	100	3.802.769.888	100	4.388.285.896	500	22.416.239.623	Biro Hukum	Denpasar
		4.01.05.1.01	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan dalam rangka kepastian hokum	100%	100	3276866824	100	1801290210	100	1.965.140.398	100	1.748.481.856	100	2.065.370.760	500	10.857.150.048	Biro Hukum	Denpasar
		4.01.05.1.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	85 dokumen	83	2803310840	83	1420958466	45	1.359.154.688	45	1.073.905.792	45	1.250.398.400	301	7.907.728.186	Biro Hukum	Denpasar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		4.01.05.1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	1600 dokumen	2000	256429676	2000	147352316	250	167.905.792	250	187.382.240	1000	212.432.240	5500	971.502.264	Biro Hukum	Denpasar
		4.01.05.1.01.03	Sub kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	600 dokumen	400	125773532	225	97928544	48	119.628.784	50	149.905.792	50	227.252.088	773	720.488.740	Biro Hukum	Denpasar
		4.01.05.1.01.04	Sub kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	25 dokumen	50	91352776	50	135050884	50	318.451.134	75	337.288.032	100	375.288.032	325	1.257.430.858	Biro Hukum	Denpasar
		4.01.05.1.02	kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase fasilitasi bantuan	100%	100	269492460	100	2029045671	100	2.457.918.276	100	2.054.288.032	100 00%	2.322.915.136	500	11.559.089.575	Biro Hukum	Denpasar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				hukum yang dilaksanakan															
		4.01.05.1.02.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	29 kasus	28	2609036460	30	1896084128	35	2.107.472.492	46	1.866.905.792	45	2.196.385.792	184	10.675.884.664	Biro Hukum	Denpasar
		4.01.05.1.02.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	0	8	85886000	8	132961543	8	350.445.784	9	187.382.240	10	126.529.344	43	883.204.911	Biro Hukum	Denpasar
		4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	80	848327272	80,5	587089054	81	7.809.060.912	81,5	7.860.057.575	81	9.506.356.347	404	26.610.891.160	Biro Hukum	Denpasar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		4.01.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan	100	100	451331688	100	3688700	100	9.654.500	100	-	100	5.208.500	500	469.883.388	Biro Hukum	Denpasar
		4.01.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	4	5.577.700	4	-	4	2.914.900	12	8.492.600	Biro Hukum	Denpasar
		4.01.01.1.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	6	6	451331688	12	3688700	1	4.076.800	1	-	14	2.293.600	34	461.390.788	Biro Hukum	Denpasar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
		4.01.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang diselesaikan	0	0	0	0	0	100	6.569.609.642	100	6.666.963.011	100	6.837.378.061	300	20.073.950.714	Biro Hukum	Denpasar
		4.01.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0	0	0	0	0	37	6.566.611.442	37	6.666.963.011	37	6.833.994.261	111	20.067.568.714	Biro Hukum	Denpasar
		4.01.01.1.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran	0	0	0	0	0	7	2.998.200	7	-	7	3.383.800	21	6.382.000	Biro Hukum	Denpasar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD															
		4.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang diselesaikan	10	100	27500000	100	79412910	100	115.677.950	100	58.528.500	100	1.344.100.000	500	1.625.219.360	Biro Hukum	Denpasar
		4.01.01.1.06.01	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	2500000	1	12000000	1	9.999.550	1	13.000.000	1	20.000.000	5	57.499.550	Biro Hukum	Denpasar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		4.01.01.1.06.02	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	5000000	0	0	1	53.504.700	1	35.452.300	1	1.000.000.000	4	1.093.957.000	Biro Hukum	Denpasar
		4.01.01.1.06.05	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	20000000	4	16915000	3	29.999.700	4	10.076.200	2	30.000.000	17	106.990.900	Biro Hukum	Denpasar
		4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0	12	50497910	0	22.174.000	0	-	4	294.100.000	16	366.771.910	Biro Hukum	Denpasar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		4.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100	100	369495584	100	503987444	100	1.114.118.820	100	1.134.566.064	100	1.319.669.786	500	4.441.837.698	Biro Hukum	Denpasar
		4.01.01.1.09.01	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0	0	0	0	0	4	474.030.144	4	410.552.896	8	546.286.896	16	1.430.869.936	Biro Hukum	Denpasar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		4.01.01.1.09.02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	11	314495584	14	459987444	9	547.565.376	10	656.483.168	9	695.852.890	53	2.674.384.462	Biro Hukum	Denpasar
		4.01.01.1.09.05	Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	1	5000000	0	0	2	5.000.000	1	-	10	5.000.000	14	15.000.000	Biro Hukum	Denpasar
		4.01.01.1.09.06	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	15	45000000	42	44000000	69	82.530.000	69	67.530.000	69	67.530.000	264	306.590.000	Biro Hukum	Denpasar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		4.01.01.1.09.11	Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	5000000	0	0	1	4.993.300	0	-	10	5.000.000	12	14.993.300	Biro Hukum	Denpasar

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian
Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Membantu Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan, pembinaan dan pelayanan pengadaan	Terwujudnya tata kelola pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali minimal baik dalam menunjang visi,	**4.**	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																		
		4.01.	**SEKRETARIAT DAERAH**																
		4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI**	**Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)**	80	80	9.962.477.600	81	13.003.588.650	82	12.898.134.891	83	20.081.125.497	84	21.085.181.772	85	77.030.508.410	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	Denpasar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
barang/ jasa serta perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan administrasi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	misi dan program Pemerintah Provinsi Bali.	**4.01.01.1.01**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku**															
		4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku															
		4.01.01.1.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah**															
		4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan	Jumlah pegawai yang menerima															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Tunjangan ASN	pembayaran gaji dan tunjangan ASN															
		4.01.01.1.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah**															
		4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan pengganda an sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu															
		4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**															
		4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas (mobil dan motor) yang dipelihara dan dalam kondisi baik															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sesuai ketentuan yang berlaku															
		04.01.06	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti**	100	100	788.804.740	100	494.867.105	100	960.764.010	100	1.056.840.411	100	1.162.524.452	100	1.162.524.452	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	Denpasar
		4.01.06.1.01	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**	**Jumlah laporan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan**															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				yang berlaku															
		4.01.06.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah laporan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		4.01.06.1.02	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**	**Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, energi, air, pertambangan dan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku**															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		4.01.06.1.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Energi, Air, Pertambangan dan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		4.01.06.1.03	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**	**Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku**															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		4.01.06.1.03.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		4.01.07	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa**	70	75	9.051.430.046	80	8.508.818.671	85	7.742.061.400	90	2.016.673.950	95	2.117.507.648	95	29.436.491.715	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	Denpasar
		4.01.07.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**															
		4.01.07.1.01.01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	dokumen strategi pengadaan barang/jasa pemerintah dan dokumen analisa kebutuhan															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		4.01.07.1.01.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kebutuhan kendaraan dinas/operasional pada perangkat daerah yang terpenuhi dan Jumlah laporan penyelesaian pengadaan barang/jasa															
				pengelolaan produk katalog local															
		4.01.07.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		4.01.07.1.02	**Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	**Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**															
		4.01.07.1.02.01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Terlaksananya pelayanan pelaksanaan pengadaan SPSE secara penuh															
		4.01.07.1.02.02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Sistem Informasi PBJ yang dikelola dan dikembangkan															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		4.01.07.1.03	**Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	**Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**															
		4.01.07.1.03.01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pembinaan dan pengembangan keahlian/kompetensi SDM pengadaan															
		4.01.07.1.03.02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen variabel kematangan terimplementasi															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		4.01.07.1.03.03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa dan penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah															
	Terwujudnya perekonomian Bali yang beradaya saing dan	**04.01.08**	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan**	50	65	983.412.357	65	348.781.765	65	401.381.900	70	441.520.090	80	485.672.099	80	485.672.099	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	Denpasar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	berkelanjutan serta meningkatkan tertib administrasi pembangunan.			**yang berlaku**															
		4.01.08.1.01	**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**Terlaksananya pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku**															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		4.01.08.1.01.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah laporan pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan (APBD dan APBN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku															
		4.01.08.1.02	**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku**															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		4.01.08.1.02.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku															

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Biro Organisasi
Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatnya kualitas Tata Kelola pemerintahan	Terwujudnya Birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif dan efisien, mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas serta pelayanan perpustakaan dalam menumbuhkan		**Program Pembinaan Perpustakaan**	**Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik**		**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**52%**	**444.957.938**						
			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Standar Pelayanan Perpustakaan		**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	85%	307.381.840						
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kegemaran Membaca Masyarakat		**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	39%	137.476.098						
		4.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali**		**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**81,50%**	**6.826.510.784**	**84,50%**	**16.402.572.545,00**						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	minat dan budaya baca masyarakat.	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai peratutan dan disampaikan tepat waktu		**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	3 Dokumen	4.903.800	0	0						
		4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu		**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	5 Dokumen	6.225.465.685	5 Dokumen	15.790.057.201						
		4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang diterbitkan tepat waktu		**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	13 Dokumen	3.186.365	13 Dokumen	7.379.510						
		4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu		**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	100%	110.002.990	100%	73.380.290						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang terinventaris dengan baik		**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	1 Laporan	482.951.944	1 Laporan	531.755.544						
		4.01.02	**Program Penataan organisasi**	**Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik**		**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**81%**	**252.625.351**	**83%**	**271872406**						
		4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran		**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	81%	146.605.313	83%	111.469.058						
		4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya baik		**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	81%	106.020.038	83%	160.403.348						
													17.119.402.889,00						

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Biro Umum dan Protokol
Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatnya kualitas Tata Kelola pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	- Nilai Evaluasi Kearsipan - Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip	- 67 - 25%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	62 50%	164.453.346	63 75%	255.136.379	- 63 - 100 %	1.403.256.191	Biro Umum dan Protokol	
			Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Terwujudnya Penataan Arsip		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	61	37.476.448	61	87.458.740			Biro Umum dan Protokol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Lembaga yang Arsipnya Dimusnahkan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	250 Box	37.476.448	250 Box	87.458.740			Biro Umum dan Protokol	
			Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75%	126.976.898	75%	167.677.636			Biro Umum dan Protokol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah pengguna Arsip yang Terlayani Jumlah Pengguna Arsip yang Terlayani Jumlah Pengguna Arsip yang Terlayani		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	400 Pengguna arsip. 4 kali Layanan Arsip	10.000.000	400 Penggguna arsip. 4 kali Layanan Arsip	39.261.320			Biro Umum dan Protokol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	LAKI dan LAKE, Kualitas Profesionalisme Pengelola Arsip di Perangkat Daerah dan Tenaga Pengelola Arsip		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35 Dokumen 30 Pengelola arsip	116.976.898	35 Dokumen 30 Pengelola arsip	128.416.316			Biro Umum dan Protokol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	80	N/A	N/A	N/A	N/A	81	83.482.129.916	82	76.205.304.308	83	76.205.304.308	100	327.382.878.672	Biro Umum dan Protokol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		N/A	N/A	N/A	N/A	81	226.708.092	82	659.815.868	100	692.807.000			Biro Umum dan Protokol	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		N/A	N/A	N/A	N/A	6 Dokumen	158.905.792	6 Dokumen	658.815.868	6 Dokumen	692.807.000			Biro Umum dan Protokol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah		N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	35.592.700		N/A	N/A	N/A			Biro Umum dan Protokol	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	32.229.600		N/A	N/A	N/A			Biro Umum dan Protokol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		N/A	N/A	N/A	N/A	81	19.414.880.577	82	28.967.939.945	100	30.416.338.000			Biro Umum dan Protokol	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji Tunjangan ASN		N/A	N/A	N/A	N/A	52 Dokumen	18.722.404.293	14 Laporan	28.313.305.599	14 Laporan	29.728.971.000			Biro Umum dan Protokol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dokumen	692.476.284	12 Laporan	654.634.346	12 Laporan	687.367.000			Biro Umum dan Protokol	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		N/A	N/A	N/A	N/A	81	346.058.579	82	383.535.005	100	402.712.000			Biro Umum dan Protokol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		N/A	N/A	N/A	N/A	31 Laporan	346.058.579	31 Laporan	383.535.005	21 Laporan	402.712.000			Biro Umum dan Protokol	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah		N/A	N/A	N/A	N/A	81	12.676.452.933	82	9.084.904.262	100	9.539.151.000			Biro Umum dan Protokol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik dan Elektronik /Penerangan Bangunan		N/A	N/A	N/A	N/A	12 Bulan	624.972.742	2 Paket	303.746.092	2 Paket	318.934.000			Biro Umum dan Protokol	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia		N/A	N/A	N/A	N/A	3 Paket	2.678.468.585	5 Paket	1.840.409.424	5 Paket	1.932.430.000			Biro Umum dan Protokol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia		N/A	N/A	N/A	N/A	12 Bulan	512.830.540		N/A	N/A	N/A			Biro Umum dan Protokol	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Pengandaan yang		N/A	N/A	N/A	N/A	12 Bulan	359.999.956	N/A	N/A	N/A	N/A			Biro Umum dan Protokol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Berupa Surat Kabar dan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Bulan	575.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A			Biro Umum dan Protokol	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersediany a Makanan dan Minuman Rapat, Pimpinan dan Tamu serta Aktivitas Lapangan		N/A	N/A	N/A	N/A	12 Blan	3.463.621.804	12 Laporan	3.648.264.444	12 Laporan	3.830.678.000			Biro Umum dan Protokol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dokumen	3.676.538.184	12 Laporan	2.707.316.880	12 Laporan	2.842.683.000			Biro Umum dan Protokol	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada		N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	195.021.540							Biro Umum dan Protokol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	SKPD		N/A	N/A	N/A	N/A	12 Bulan	589.999.582	2 Sistem	585.167.422	2 Sistem	614.426.000			Biro Umum dan Protokol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		N/A	N/A	N/A	N/A	81	13.462.840.390	82	9.993.593.052	100	10.493.273.000			Biro Umum dan Protokol	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang tersedia di		N/A	N/A	N/A	N/A	12 Bulan	10.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A			Biro Umum dan Protokol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lingkungan Setda		N/A	N/A	N/A	N/A	3 Jenis	1.395.000.000	3 Rekening	1.708.500.000	3 Rekening	1.793.925.000			Biro Umum dan Protokol	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		N/A	N/A	N/A	N/A	12 Bulan	7.598.396.992	12 Laporan	3.551.092.944	12 Laporan	3.728.648.000			Biro Umum dan Protokol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia		N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	4.454.943.398	108 Orang	4.734.000.108	108 Orang	4.970.700.000			Biro Umum dan Protokol	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		N/A	N/A	N/A	N/A	81	14.187.197.321	82	7.948.369.154	100	8.345.787.000			Biro Umum dan Protokol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan yang dikelola		N/A	N/A	N/A	N/A	12 Bulan1770131800		N/A	N/A	N/A	N/A			Biro Umum dan Protokol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	oleh Setda		N/A	N/A	N/A	N/A	12 Bulan	4.598.104.992	141 Unit	6.325.363.182	141 Unit	6.641.631.000			Biro Umum dan Protokol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya mebel		N/A	N/A	N/A	N/A	12 Bulan	60.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A			Biro Umum dan Protokol	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor		N/A	N/A	N/A	N/A	12 Bulan	2.151.178.105	N/A	N/A	N/A	N/A			Biro Umum dan Protokol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana perlengkapan gedung kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara		N/A	N/A	N/A	N/A	12 Bulan	1.207.782.484	24 Paket	1.623.005.972	24 Paket	1.704.156.000			Biro Umum dan Protokol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil		N/A	N/A	N/A	N/A	81	5.056.514.594	82	4.747.349.060	100	4.984.717.000			Biro Umum dan Protokol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Gaji KDH & WKDH		N/A	N/A	N/A	N/A	14 Dokumen	289.485.488	12 Laporan	247.349.060	12 Laporan	259.717.000			Biro Umum dan Protokol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Biaya Penunjang Operasional KDH & WKDH		N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dokumen	4.767.029.106	12 Laporan	4.500.000.000	12 Laporan	4.725.000.000			Biro Umum dan Protokol	
			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Meningkatnya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		N/A	N/A	N/A	N/A	81	15.965.974.292	82	11.974.281.466	100	12.572.996.000			Biro Umum dan Protokol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali		N/A	N/A	N/A	N/A	12 Bulan	12.305.974.332	12 Laporan	8.695.476.759	12 Laporan	9.130.251.000			Biro Umum dan Protokol	
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali		N/A	N/A	N/A	N/A	12 Bulan	3.454.999.960	12 Laporan	3.018.324.707	12 Laporan	3.169.241.000			Biro Umum dan Protokol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali		N/A	N/A	N/A	N/A	12 Bulan	205.000.000	12 Laporan	260.480.000	12 Laporan	273.504.000			Biro Umum dan Protokol	
			Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan		N/A	N/A	N/A	N/A	81	525.880.000	82	469.974.800	100	469.974.800			Biro Umum dan Protokol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Atensi Tamu VIP dan VVIP		N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dokumen	525.880.000	12 Laporan	469.974.800	12 Laporan	469.974.800			Biro Umum dan Protokol	
			Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan		N/A	N/A	N/A	N/A	81	1.619.603.138	82	1.975.541.696	100	2.015.357.824			Biro Umum dan Protokol	
			Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pimpinan dan Tamu		N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dokumen	762.135.120	N/A	N/A	N/A	N/A			Biro Umum dan Protokol	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala	Jumlah Fasilitas Tamu Kepala Daerah dan Wakil		N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dokumen	67.700.000	N/A	N/A	N/A	N/A			Biro Umum dan Protokol	
			Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Kepala Daerah yang tersedia		N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dokumen	789.768.018	12 Laporan	1.975.541.696	12 Laporan	2.015.357.824			Biro Umum dan Protokol	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rumusan Indikator Kinerja merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Indikator kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2018-2023.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja PD selama lima tahun.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah (lima tahunan) yang memuat indikasi kegiatan yang disusun dengan penyesuaian-penyesuaian terkini sesuai dengan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang- undangan, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Bali serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
I	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							
1	Persentase Perpustakaan yang tertangani dengan baik	47%	48%	49%	51%	52%	53%	53%
2	Persentase Peningkatan Koleksi Perpustakaan	10%	10%	18,85%	20%	21%	22%	22%
II	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							
1	Nilai Evaluasi Kearsipan	67	70	71	61	62	63	63
2	Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang tertib arsip	25%	25%	35%	50%	75%	100%	100%
3	Persentase Arsip yang Terlindungi dan Terselamatkan	N/A	N/A	N/A	N/A	30%	40%	40%
4	Persentase Capaian Standar Penggunaan Arsip	N/A	N/A	N/A	N/A	30%	50%	50%

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Provinsi Bali tahun 2018-2023 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penunjang dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Provinsi Bali yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga untuk tercapainya sasaran Pembangunan Nasional di Provinsi Bali. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Sekretariat Daerah ini akan menjadi acuan dalam Penilaian Kinerja Sekretariat Daerah.

Karena itu, renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi Bali. Harus diperhatikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Sekretariat Daerah merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target penyelenggaraan bidang/urusan penunjang dan atau target kinerja sasaran Sekretariat Daerah.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Sekretariat Daerah yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Sekretariat Daerah harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Sekretariat Daerah. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Sekretariat Daerah dimasa yang akan datang.

Akhir kata semoga Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten. Oleh karena itu, setiap pegawai perlu memahami kemana arah kebijakan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.